

## **BAB II**

### **DIPLOMASI PUBLIK AFRIKA SELATAN ERA APARTHEID DAN PASCA APARTHEID**

Diplomasi dilakukan untuk menjaga hubungan dan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Diplomasi juga digunakan sebagai alat oleh setiap negara dalam melakukan pendekatan dan sebagai media berunding sehingga sebuah kepentingan Negara dapat tercapai. Afrika Selatan sebagai negara yang memiliki sejarah pekat Rasisme yang dicekam oleh berbagai negara dan organisasi internasional melakukan berbagai upaya diplomasi, penulis akan membahas dinamika politik dan diplomasi yang terjadi pada era Apartheid dan pasca Apartheid.

#### **A. Era Apartheid**

Politik Apartheid muncul dari Afrika Selatan. Afrika Selatan dikenal sebagai daerah yang subur serta memiliki hasil tambang emas dan intan yang berlimpah. Pada mulanya, negara ini merupakan kolonialisme dari Bangsa Portugis. Di abad ke-7 negara ini jatuh pada kekuasaan Belanda, warga Belanda banyak datang dan bermukim di Afrika Selatan. Pada tahun 1812, warga Negara Inggris ikut berdatangan ke daerah Afrika Selatan karena sumber daya alam yang dimiliki oleh Afrika Selatan.

Kedatangan Inggris ke Afrika Selatan mendesak warga Belanda yang telah tinggal. Karena desakan tersebut Belanda dan Inggris saling melancarkan serangan untuk merebut kekuasaan hingga Inggris berhasil menguasai tanah Afrika Selatan.

Afrika Selatan dibagi menjadi 2 wilayah, Afrika Selatan bagian utara dikuasai oleh bangsa Boer, sementara Afrika Selatan bagian selatan dikuasai oleh bangsa Inggris. Pada daerah Afrika Selatan di wilayah selatan, Inggris membangun negara Natal dan Cape Town, sedangkan di wilayah utara dibangun dua negara yang bernama Oranye Vrijstaat dan Transvaal.<sup>15</sup> Seiring berdirinya kedua pihak yang saling bertentangan ini, terus terjadi konflik dan saling serang antar kedua pihak.

Pada tahun 1910, perang antar kedua pihak yang dikenal sebagai Perang Boer ini berakhir yang membuat Inggris berhasil meraih kemenangan. Pada akhirnya karena kekosongan pada daerah kekuasaan Belanda, Inggris menyatukan wilayah Afrika Selatan menjadi satu bernama Uni Afrika Selatan. Uni Afrika Selatan merupakan negara republik dan dipimpin seorang Presiden Wakil Inggris yaitu Hendrik Verwoed. Hendrik Verwoed Beliau. Dia membuat sebuah kebijakan untuk memisahkan rakyat kulit putih dan rakyat kulit hitam dan hal ini merupakan awal dari politik Apartheid.<sup>16</sup>

Pada tahun 1913 dibentuk Native Land Act yang membatasi warga kulit hitam untuk membeli lahan di luar daerah yang sudah disediakan pemerintah, sementara warga

---

<sup>15</sup>Adams, John. 2012. *The History of Apartheid in South Africa*. Diakses dari <http://www-cs-students.stanford.edu/~cale/cs201/Apartheid.hist.html> , pada tanggal 29 November 2017

<sup>16</sup> Evans, Marris K. 2007. *Apartheid (1948-1994)*. Diakses dari <http://www.blackpast.org/gah/Apartheid-1948-1994>. pada tanggal 29 November 2017

kulit putih diperbolehkan membeli lahan di wilayah kulit hitam. pada tahun 1927 di berlakukan Undang-Undang Imoraitas tentang larangan perkawinan campuran antara kulit putih dengan kulit hitam. Setelah Presiden Verwoed meninggal, posisinya dipimpin Pieter Botha.

Pieter Botha menerapkan sistem homeland. Pada tahun 1967, Pieter Botha menghimbau kepada rakyatnya bahwa pembentukan homeland ini dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai negara bagian otonom. Tetapi banyak Rakyat yang tidak memahami kebijakan yang diberlakukan bahwa politik Apartheid yang membuat pembangunan daerah pemukiman menjadi terpisah-pisah. Kebijakan ini berakibat memecah integrasi di Afrika Selatan dan juga menciptakan posisi yang dianggap aman bagi keberadaan minoritas bangsa kulit putih pada saat itu.

Politik Apartheid memisahkan masyarakat kedalam 4 kelompok ras, yaitu kulit putih, kulit hitam, keturunan India, dan kulit berwarna. Kelompok masyarakat kulit putih, 14% dari jumlah penduduk memperoleh alokasi 87% tanah yang terbaik, tempat yang dianggap lebih baik dan menikmati taraf hidup yang tertinggi di dunia. Afrika Selatan yang kaya akan emas dan intan.

Penduduk kulit hitam tidak bisa menikmati kebebasan mereka juga tidak memiliki kekuatan politik dan kesempatan untuk menikmati pendidikan, sedangkan lapangan pekerjaan sangat minim. seluruh system yang berlaku digunakan dengan cara yang keras melalui kekuatan militer. Semua dipisahkan atau dibedakan sesuai ras dan warna kulit. Pemisahan ini

dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950-an, 1960-an, 1970-an.<sup>17</sup>

Seiring berjalanya waktu, orang-orang kulit hitam mulai memahami tujuan dilakukannya pembentukan homeland merupakan rasialisme kondisi ini membuat rakyat kulit hitam mulai bangkit dan melakukan perlawanan. Namun pemerintahan Pieter Botha tidak hanya diam dan bersembunyi.

Apartheid menjadi isu panas di mata dunia, mendorong kearah meluasnya sanksi internasional, dan membuat pertumpahan darah di Afrika Selatan. Isu ini juga mengakibatkan demonstrasi, protes, dan sabotase oleh berbagai gerakan anti-Apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).<sup>18</sup>

Peristiwa kekerasan dan perlawanan juga terjadi di Sharpeville 21 maret 1960, ketika polisi menembak 69 mati orang dan banyaknya korban yang terluka. Akibatnya Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 134 yang menyerukan Afrika Selatan untuk meninggalkan kebijakaan rasialnya, namun resolusi ini tidak diindahkan.<sup>19</sup>

Tindakan PBB terhadap Afrika Selatan dengan adanya politik Apartheid, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Masalah Apherteid di Afrika Selatan Diakses dari <http://wartasejarah.blogspot.co.id/2015/06/masalah-Apartheid-di-afrika-selatan.html> pada tanggal 30 November 2017

<sup>18</sup> Op.Cit

<sup>19</sup> Ibid

- a) Pada tahun 1962 Majelis Umum PBB membentuk Komite Khusus menentang Apartheid supaya situasi bisa terus-menerus diawasi.
- b) Pada tahun 1963 Dewan Keamanan PBB menyerukan embargo senjata secara sukarela terhadap Afrika Selatan.
- c) Pada tahun 1965 Dana Perwakilan PBB untuk Afrika Selatan dibentuk untuk membantu korban Apartheid, termasuk mereka yang meninggalkan negeri itu.
- d) Pada tahun 1968 Majelis Umum PBB melakukan boikot budaya dan olahraga sehingga para seniman, aktor, olahragawan, dan lain-lain tidak bisa tampil di Afrika Selatan, yang sebelumnya tahun 1964 telah ikut dalam Olimpiade.
- e) Pada tahun 1974 Embargo senjata terhadap Afrika Selatan, yang semula sukarela, menjadi sanksi wajib, dan keanggotaan Negara itu di PBB dibekukan.<sup>20</sup>

Afrika Selatan meningkatkan keamanan dengan menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal negara lain pada 16 Juni 1976 menjadi tragedy Soweto, yang merupakan perlawanan terhadap politik Apartheid. Peristiwa Soweto diawali dengan demonstrasi murid-murid sekolah (kulit hitam) menentang pemakaian bahasa Afrikan (bahasa golongan Boer dikota Soweto). Gerakan anti Apartheid di Republik Afrika Selatan mendapat dukungan kuat dari Dunia Internasional.pada umumnya Dunia Internasional mengutuk sikap dan tindakan rezim Protertia. Masyarakat internasional mengecam terhadap politik Apartheid.

---

<sup>20</sup> Ibid

Bertahun-tahun lamanya Amerika Serikat dalam setiap resolusi di Dewan Keamanan PBB memblokir Afrika Selatan dan pada tahun 1976 diberlakukan konvensi anti Apartheid. Seluruh negara dipenjuru dunia dan beribu-ribu orang turun kejalan berdemonstrasi menentang Apartheid. Inggris dan kelompok-kelompok negara persemakmuran berusaha menyelesaikan konflik di Afrika Selatan dengan diplomasi. Tetapi syarat-syarat ekonomi dan militer yang dimiliki gerakan perlawanan Republik Afrika Selatan dan negara-negara garis depan tidak mendukung berlangsungnya perjuangan yang mandiri. Bantuan dari Negara Barat menentukan situasi Republik Afrika Selatan, agar menekan pemerintahan Pretoria untuk melakukan diplomasi untuk menciptakan perdamaian.

Diplomasi yang dilakukan dengan Mozambik mendapat persetujuan untuk mengakhiri peristiwa diantara kedua belah pihak. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan Nkomati, yang ditandatangani oleh Pieter Botha dan Samora Marel, pada tahun 1984.

Persetujuan dari dua Negara tersebut agar membatasi wilayah masing-masing sebagai basis kegiatan saling menyerang dan merongrong kegiatan dua Negara. Artinya Mozambik harus mencegah African National Congress (ANC) menggunakan wilayahnya untuk menyerang Republik Afrika Selatan, sebaliknya Republik Afrika Selatan harus mengakhiri bantuannya kepada gerakan pemberontakan Mozambi National Resistance (MNR).

Pada tahun 1983 diumumkan UUD baru yang berlaku mulai tahun 1984. Berdasarkan UUD baru tersebut diadakanlah penyusunan kembali parlemen, yang dibagi kedalam tiga dewan, yaitu:

- 1) Sidang Majelis Kulit Putih
- 2) Dewan Perwakilan Kulit Berwarna

3) Badan Perutusan Asia Golongan kulit hitam tidak mendapat tempat didalam UUD yang baru tersebut.<sup>21</sup>

Parlemen hasil perundang-undangan menetapkan P.W. Botha sebagai kepala Negara dengan kekuasaan konstitusional, termasuk juga kekuasaan sebagai perdana menteri. PBB mengutuk UUD baru ini, yang mengucilkan rakyat kulit hitam.

Masyarakat internasional kemudian mengurangi dukungan politiknya terhadap rezim Apartheid. Amerika Serikat juga turut berkontribusi dalam setiap resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir Afrika Selatan dan pada tahun 1976 diberlakukan konvensi anti Apartheid.

Perlawanan besar terhadap politik Apartheid dilakukan oleh Kongres Nasional Afrika (African National Congress/ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela. Perjuangan ANC mencapai hasil tahun 1990 dengan dibebaskannya Nelson Mandela oleh Presiden F.W.de Klerk dari penjara. Sebuah solusi terbaik dan paling damai menuju penghapusan Apartheid dan penciptaan satu Afrika Selatan yang baru adalah dengan jalan bekerja sama.

Pada tahun 1992, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan dua resolusi (765 dan 772), yaitu pembentukan utusan khusus (Misi Pengamat PBB) di Afrika Selatan yang akan memberikan laporan, memberikan wewenang, dan mengawasi pemilihan umum untuk menjamin bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan adil. Pada tanggal 23 Juni 1994 Afrika Selatan menempati kursinya kembali di majelis umum PBB.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Op.Cit

## B. Era Pasca Apartheid

Berakhirnya politik Apartheid ditandai dengan pemilu di Afrika Selatan pada 23 April 1994. 23 tahun sudah Afrika Selatan menjalani Demokrasi 22 juta orang telah memberikan suara pilihanya kepada African National Congress (ANC) mendapatkan suara 62.65 % . National Party (NP) memperoleh suara 20.39 % , Inkatha Freedom Party (IFP) 10.54 % , Freedom Front (FF) 2.2 % , Democratic Party (DP) 1.7 % , Pan Africanist Congress (PAC) 1.2 % dan African Christian Democratic Party 0.5 % . Dari hasil tersebut partai ANC memenangkan pemilu dan sebagai calon yang diusung partai Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan<sup>23</sup>.

**Gambar 1. 1 Antrian proses pemilihan di Afrika tahun 1994**



Diawal kepemimpinan Nelson Mandela berusaha untuk melakukan rekonsiliasi rakyat Afrika. Pada waktu yang

---

<sup>23</sup> South Africa's first democratic elections Diakses dari <http://www.sahistory.org.za/dated-event/south-africas-first-democratic-elections> pada tanggal 30 November 2017

bersamaan Afrika Selatan terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby 1995 melalui film *Invictus* di ilustrasikan bahwa Nelson Mandela percaya bahwa olahraga dapat menyatukan rakyat kulit hitam dan kulit putih.

Nelson Mandela mengambil jalan Diplomasi melalui olahraga sebagai upaya mengkapitalisasi toleransi rakyat di Afrika Selatan. Penyelenggaraan piala dunia ini dinilai berhasil dan mendapatkan apresiasi dari mata dunia. Kemudian Nelson Mandela juga melakukan upaya Diplomasi Olahraga Piala Afrika 1996, Piala Dunia Atletik 1998.

Politik luar negeri Afrika Selatan juga mengalami Perubahan dimana Nelson Mandela melakukan upaya untuk mendapatkan citra dimata dunia adapun hal yang dilakukan oleh Nelson Mandela:

1. Kembali bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Bergabung dalam organisasi Persatuan Afrika (OUA) tahun 1994
3. Bergabung dalam komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) tahun 1994
4. Bergabung gerakan Non-Blok tahun 1998
5. Bergabung dalam unit PBB seperti ILO, WHO, dan FAO tahun 1997
6. Ikut serta dalam negosiasi dengan Uni Eropa tahun 1995.<sup>24</sup>

Dinamika Diplomasi Afrika Selatan pada tahun dilakukannya penelitian mengalami pasang surut hal ini terjadi karena adanya perbedaan rezim politik yang terjadi.

---

<sup>24</sup> Oc.Pit